

# Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Yesi Mala Sari<sup>1</sup>, Sulis Pratiwi<sup>2</sup>, Rizky Mardeansyah<sup>3</sup>, Naya Khairunnisa<sup>4</sup>, Erinaldi<sup>5</sup>

<sup>1</sup> STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia; yessyyy384@gmail.com

<sup>2</sup> STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia; sulis497@gmail.com

<sup>3</sup> STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia; rizkymardeansyah4869@gmail.com

<sup>4</sup> STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia; nayakhairunnisa97@gmail.com

<sup>5</sup> STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia; erinaldipratama2905@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Keywords:

PKH;  
Policy Implementation;  
Community Welfare;  
Poverty

### Article history:

Received 2025-09-01

Revised 2025-10-01

Accepted 2025-11-03

## ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a government policy that aims to reduce poverty through conditional social assistance. This study aims to analyze the implementation of PKH in improving community welfare based on a literature review. The method used is a literature study with a narrative review approach to various journals, scientific articles, and official documents. The results of the study show that PKH contributes to increasing purchasing power, access to education and health, and reducing poverty rates. However, its implementation still faces obstacles such as targeting accuracy, dependence on assistance, limited assistance, and weak coordination between institutions. In conclusion, the effectiveness of PKH is highly determined by the quality of its implementation and the need to integrate it with empowerment programs in order to encourage the independence of Beneficiary Families (KPM).

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



## Corresponding Author:

Yesi Mala Sari

STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia; yessyyy384@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya terselesaikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kebijakan publik yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sawitri & Rahmat, 2024).

Salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial nasional. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak bersekolah dan anggota keluarga memanfaatkan layanan kesehatan dasar. Tujuannya tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Liberti & Yuliani, 2021).

Pelaksanaan PKH melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran saling melengkapi. Kementerian Sosial bertindak sebagai pembuat kebijakan dan penentu arah strategis, sedangkan pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana teknis yang memastikan validasi data dan penyaluran bantuan tepat sasaran. Di sisi lain, pendamping sosial berperan penting dalam mendampingi KPM agar mampu memenuhi kewajiban program sekaligus memberikan dukungan moral dan motivasi. Sinergi antara ketiga pihak ini sangat menentukan keberhasilan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, ketergantungan terhadap bantuan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga (Rahmah & Megawati, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PKH telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan daya beli, akses pendidikan, dan layanan kesehatan (Ikhsan, Bedasari, & Hadi, 2022; Yulia & Situmorang, 2023). Namun demikian, sejumlah studi juga menyoroti kendala yang menghambat efektivitas program, seperti keterbatasan pendampingan, validitas data penerima, dan munculnya kecemburuan sosial di antara masyarakat non-penerima (Dyas & Agustina, 2023; Mustifa, Kadir, & BB, 2024). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa implementasi PKH masih menyisakan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil pelaksanaannya.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan studi literatur. Fokus pembahasan diarahkan pada efektivitas pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta strategi optimalisasi kebijakan ke depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran PKH dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan agar program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature study*) yang berfokus pada analisis naratif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan publik dilaksanakan dan sejauh mana efektivitasnya dalam konteks sosial yang kompleks.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah kebijakan PKH sebagai objek kajian utama, sedangkan unit analisis mencakup dokumen kebijakan, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta data sekunder yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data diperoleh dari literatur nasional maupun internasional yang membahas pelaksanaan, dampak, dan tantangan program PKH di berbagai daerah di Indonesia.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dan mutakhir, terutama publikasi ilmiah lima tahun terakhir. Kedua, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara teori implementasi kebijakan publik dan hasil penelitian terdahulu. Ketiga, hasil analisis dibandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antarpenelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi PKH.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atau hambatan pelaksanaan PKH dapat dijelaskan secara sistematis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan hasil-hasil studi terdahulu, tetapi juga menginterpretasikan secara kritis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sosial. Hasil akhirnya diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil analisis studi literatur mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembahasannya berdasarkan teori implementasi kebijakan publik serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa PKH berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, ketepatan sasaran, dan dukungan kelembagaan.

#### A. Hasil Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian, PKH terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menurunkan tingkat kemiskinan (Ikhsan et al., 2022; Yulia & Situmorang, 2023). Melalui bantuan tunai bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat meningkatkan daya beli serta memperoleh layanan sosial dasar dengan lebih mudah.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PKH di berbagai wilayah tidak selalu seragam. Penelitian Mustifa et al (2024) menemukan bahwa intensitas pendampingan sosial sangat memengaruhi keberhasilan program. Daerah dengan pendamping aktif menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan wilayah dengan pendamping pasif. Di sisi lain, Dyas & Agustina (2023) menyoroti persoalan akurasi data penerima dan lemahnya monitoring yang menyebabkan distribusi bantuan kurang tepat sasaran.

#### B. Analisis Berdasarkan Teori Implementasi George C. Edwards III

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, terdapat empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Handoyo, 2012).

##### 1. Komunikasi

Kejelasan informasi dan sosialisasi mengenai tujuan serta mekanisme program menjadi kunci keberhasilan PKH. Di beberapa daerah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang syarat program menyebabkan bantuan tidak dimanfaatkan secara optimal.

##### 2. Sumber Daya

Keterbatasan jumlah pendamping sosial dan fasilitas administrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan PKH. Minimnya pelatihan bagi pendamping juga berdampak pada kurang efektifnya proses pendampingan di lapangan.

##### 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen aparat pelaksana berpengaruh terhadap efektivitas program. Pendamping sosial yang memiliki empati dan motivasi tinggi mampu meningkatkan kepercayaan serta partisipasi aktif KPM dalam kegiatan pemberdayaan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Koordinasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana masih belum optimal. Lemahnya integrasi data antarinstansi sering menghambat penyaluran bantuan dan menimbulkan tumpang tindih penerima.

#### C. Dampak Sosial dan Ekonomi PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, pelaksanaan PKH memberikan tiga dampak utama terhadap kesejahteraan masyarakat (Fobia, Neolaka, & Rihii, 2025):

- Peningkatan daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama di kalangan keluarga miskin.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, melalui kewajiban KPM untuk memastikan anak bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.
- Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial secara bertahap di wilayah sasaran program.

Namun, di sisi lain, muncul beberapa permasalahan seperti ketergantungan terhadap bantuan, kurangnya kemandirian ekonomi, serta kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima (Yulia & Situmorang, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, keberlanjutan dampaknya masih perlu diperkuat melalui strategi pemberdayaan pascabantuan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PKH sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan sinergi antaraktor kebijakan. Kementerian Sosial perlu memperkuat sistem validasi dan pembaruan data penerima manfaat secara berkala untuk mencegah kesalahan sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas pendamping sosial sangat penting agar proses pendampingan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku dan kemandirian ekonomi KPM. Dari perspektif kebijakan publik, PKH seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial bersyarat, tetapi juga sebagai program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kegiatan seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan usaha mikro, PKH dapat menjadi pendorong nyata kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan teori Edwards III, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan koordinasi kelembagaan yang baik. Oleh karena itu, optimalisasi keempat aspek ini perlu menjadi prioritas dalam reformasi pelaksanaan PKH di masa mendatang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen kebijakan sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan. Program ini terbukti mampu memperkuat akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat (KPM), serta berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan secara bertahap.

Namun, keberhasilan implementasi PKH sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal akurasi data penerima, kapasitas pendamping sosial, serta koordinasi antarinstansi pelaksana. Kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar efektivitas program dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, PKH perlu diarahkan tidak hanya sebagai program bantuan bersyarat, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan modal sosial keluarga penerima manfaat.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya memperkuat empat aspek utama dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang efektif. Keempat aspek ini harus berjalan sinergis agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian difokuskan pada evaluasi longitudinal terhadap dampak jangka panjang PKH, khususnya dalam aspek kemandirian ekonomi pasca bantuan dan perubahan perilaku sosial penerima manfaat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam terkait efektivitas model pendampingan sosial dan inovasi kebijakan pemberdayaan yang terintegrasi dengan PKH, agar hasil temuan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Dyas, E. W., & Agustina, I. F. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(1), 1–12. Retrieved From <https://Jurmafis.Untan.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/View/2862>
- Fobia, M., Neolaka, M. N. B. C., & Rihii, D. W. (2025). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Pembangunan*, 5(2), 45–58.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Edisi Pert; Mustrose, Ed.). Semarang: Widya Karya Semarang.
- Ikhsan, M., Bedasari, H., & Hadi, A. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 171–176. <https://doi.org/10.46730/Japs.V3i3.89>
- Liberti, & Yuliani, F. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Dumai Barat. *Jurnal Niara*, 14(3), 224–232. <https://doi.org/10.31849/Niara.V14i3.7379>
- Mustifa, K., Kadir, A., & Bb, S. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Latugho. *Rezpublica*, 10(3), 289–303. Retrieved From <https://Rezpublica.Uho.Ac.Id/Index.Php/Journal/Article/View/61>
- Rahmah, L. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi Program Sekolah Penggerak Di Sd Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika*, 12(1), 147–159. <https://doi.org/10.26740/Publika.V12n1.P147-159>
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.47134/Villages.V6i1.200>
- Yulia, W. Z., & Situmorang, L. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Tubaan Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau. *E-Journal Pembangunan Sosial*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/Jispar.V4i1.380>

